



PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2023

Nurika Fauziah¹ Sutrisno²

Article history:

Submitted: 18 Oktober 2024

Revised: 16 Januari 2025

Accepted: 20 Januari 2025

Keywords:

DAK;

DAU;

Fiscal Decentralization;

PAD;

Poverty;

Abstract

In 2023, with the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta Province (DIY) estimated to reach 11.04 percent, Yogyakarta will again become the poorest province on the island of Java. This figure is the 14th highest poverty rate among 38 provinces in Indonesia. To overcome this problem, the government, economic actors and local communities must work together to find solutions. The government is dedicated to alleviating poverty and improving the quality of the economy, health services and education. Infrastructure development is an important step to achieve decentralization. The main objective of this research is to examine how partial and simultaneous fiscal decentralization impacts poverty in D.I. Yogyakarta Province. This research uses quantitative research techniques. Panel data will be collected from six regencies/cities in D.I Yogyakarta Province during the period 2017 to 2023. This research uses secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Balances (DJPK). The results of this research are that the PAD variable (X1) has a positive and significant influence on the poverty variable (Y). Both the DAU (X2) and DBH (X4) variables have a negative and significant influence on the poverty variable (Y), while the DAK variable (X3) has a positive influence on the poverty variable (Y), but is not statistically significant.

Kata Kunci:

DAK

DAU;

Desentralisasi Fiskal;

Kemiskinan;

PAD;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi, Universitas

Bojonegoro, Jawa Timur,

Indonesia

Email:

fauziarika78@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2023, dengan angka kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkirakan mencapai 11,04 persen D.I Yogyakarta kembali menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi ke-14 di antara 38 provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk mencari solusi. Pemerintah berdedikasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mencapai desentralisasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana desentralisasi fiskal secara parsial dan simultan yang berdampak pada kemiskinan di D.I. provinsi Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Data panel akan dikumpulkan dari enam kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK). Hasil dari penelitian ini yaitu variabel PAD (X1) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Baik variabel DAU (X2) maupun DBH (X4) mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). sedangkan Variabel DAK (X3) mempengaruhi secara positif terhadap variabel kemiskinan (Y), namun tidak signifikan secara statistik.

Fakultas Ekonomi, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia²

Email: sutrisnoxanyar13@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang mendesak dalam manusia dan menjadi tantangan bersama yang dihadapi oleh suatu negara. Di negara maju seperti Amerika Serikat juga mengalami permasalahan kemiskinan, pertumbuhan ekonominya pesat juga gagal mengangkat banyak penduduk miskin yang ada keluar dari kemiskinan (Jinsong *et al.*, 2024). Kemiskinan merupakan masalah di berbagai negara terutama pada negara yang sedang berkembang (Triani *et al.*, 2020). Kemiskinan merupakan hasil dari peningkatan kualitas lembaga di negara-negara berkembang (Digdowiseiso, 2022). Secara khusus di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan oleh pemerintah. Secara khusus di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam upaya bersama-sama mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Faza, 2024). Kemiskinan adalah masalah yang rumit dalam masyarakat karena tidak hanya mencakup pendapatan buruk dan pengangguran, namun juga rendahnya pendidikan, rendahnya kesejahteraan, dan terbatasnya keterlibatan dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan sering kali diartikan sebagai suatu kondisi dimana isu-isu penting seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan tidak tertangani (Mudawari *et al.*, 2022).

Tabel 1.
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D.I Yogyakarta	13,02	12,13	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04
Kulonprogo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,50	14,04	12,27	11,95
Gunung Kidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49

Sumber: BPS Provinsi D.I Yogyakarta, 2023

Berdasarkan Tabel 1, angka kemiskinan di D.I Yogyakarta cenderung menurun pada tahun 2017-2019. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,02% pada tahun 2017, 12,13 persen pada tahun 2018, dan 11,70 persen pada tahun 2019. Angka kemiskinan menurun sebesar 1,34 persen dari tahun 2017 dan 2019. Angka kemiskinan di D.I Yogyakarta tumbuh dari tahun 2019 hingga 2021: persentase penduduk miskin sebesar 11,70 persen pada tahun 2019, 12,28 persen pada tahun 2020, dan 12,80 persen pada tahun 2021. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kemiskinan. COVID-19 berdampak pada kenaikan harga komoditas, pengangguran dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berdasarkan BPS DIY 2023 tahun 2019-2021 angka kemiskinan di D.I Yogyakarta meningkat sebesar 1,10 persen. Setelah upaya pemerintah untuk mengurangi pandemi COVID-19 pada tahun 2022-2023 berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2022 angka kemiskinan sebesar 11,34 persen, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 11,04 persen atau turun 0,30 persen.

Pada tahun 2023, berdasarkan BPS DIY 2023 tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkirakan mencapai 11,04 persen D.I Yogyakarta kembali menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi ke-14 di antara 38 provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di sektor DIY mencapai 448.470 jiwa pada tahun 2023. Tingginya angka kemiskinan di sektor D.I Yogyakarta tidak bisa dibedakan dari pola konsumsi

masyarakat. Pola konsumsi masyarakat D.I Yogyakarta relatif berbeda dan cenderung unik dibandingkan daerah lain. Provinsi D.I Yogyakarta mempunyai potensi wisata yang besar, namun kemiskinan masih menjadi tantangan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk mencari solusi. Pemerintah berdedikasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mencapai desentralisasi fiskal (Ernita, 2024).

Pada tanggal 1 Januari 2001, desentralisasi secara resmi diterapkan di Indonesia. Peralihan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing ditandai dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta peraturan perundang-undangan yang menyertainya. Selama 18 tahun, desentralisasi fiskal di Indonesia telah menimbulkan perdebatan apakah desentralisasi telah meningkatkan kinerja ekonomi atau tidak (Permai *et al.*, 2021). Manfaat utama desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang pilihan negatif daripada pemerintah pusat. Terlihat bahwa pemerintah daerah terlibat dalam pengambilan hal itu berdampak pada peningkatan efisiensi pemerintah secara keseluruhan (Sohail *et al.*, 2022).

Pengalihan kekuasaan dan akuntabilitas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Sumber daya keuangan yang memadai harus didelegasikan bersamaan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab utama. Peralihan wewenang dan tanggung jawab anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, seperti pemerintah daerah atau daerah, dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Meningkatkan tanggung jawab daerah, otonomi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan adalah tujuannya (Monteiro, 2024). Tiga ukuran utama yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal yaitu pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer daerah berupa dana perimbangan, dan pengeluaran berupa belanja daerah (Puspita & Hamidi, 2021).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu metode transfer dana APBN dalam konteks kebijakan fiskal nasional, dengan tujuan mencapai keberlanjutan fiskal jangka dan merangsang kegiatan perekonomian lokal (Christia & Ispriyarso, 2019). Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak (Galela, 2016). Berdasarkan data DJPK (2023), pendapatan asli daerah dan transfer daerah berupa DAU, DBH, dan DAK menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta mempunyai kinerja daerah yang baik. Kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah semakin meningkat. Setiap tahun, ini menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan sumber pendapatan dalam negerinya.

Tabel 2.
Jumlah Realisasi Anggaran PAD, DAU, DAK, DBH di Provinsi D.I Yogyakarta

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH
2017	1.851.970.000	1.314.370.000	967.000.000	125.480.000
2018	2.040.720.000	1.314.370.000	912.150.000	93.140.000
2019	2.082.800.000	1.351.100.000	984.970.000	57.010.000
2020	1.876.710.000	1.227.650.000	1.029.510.000	115.820.000
2021	1.900.920.000	1.224.850.000	1.080.520.000	133.540.000
2022	2.263.430.000	1.224.850.000	607.270.000	119.690.000
2023	2.368.680.000	1.267.720.000	636.500.000	122.650.000

Sumber: DJPK, 2023

PAD merupakan jumlah total pendapatan yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, pungutan pajak daerah, badan pendapatan daerah, statistik singkat aset daerah, dan juga sumber pendapatan sah lainnya di daerah tersebut. Setiap daerah membutuhkan dana yang besar untuk proyek pembangunan, sehingga pemerintah tidak dapat mengandalkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Dalam skenario ini, daerah dapat memanfaatkan kemampuan daerahnya untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, proyek pertumbuhan daerah, dan meningkatkan pendapatan daerah (Paat *et al.*, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi DIY merupakan yang terkecil dibandingkan empat provinsi lain di Pulau Jawa (Laila *et al.*, 2022), Hal ini disebabkan kecilnya wilayah provinsi D.I Yogyakarta sehingga mengakibatkan keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini pendapatan daerah provinsi D.I Yogyakarta bergantung pada sektor pariwisata, jasa dan industri kreatif. Dapat diketahui pada Tabel 2 tahun 2017 dan 2019, PAD mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Meski demikian, industri pariwisata di D.I. Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat permasalahan pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada penurunan PAD pada pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2022-2023, PAD meningkat karena inisiatif pemerintah yang fokus pada pemaksimalan sektor-sektor utama seperti pariwisata, jasa, dan industri kreatif. Meningkatnya pendapatan dari sektor-sektor ini memungkinkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber pendanaan yang lebih mandiri untuk upaya pengentasan kemiskinan.

Setiap tahun, daerah otonom di Indonesia menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk proyek pembangunan mereka. Pada tahun ini, sumber pendanaan utama APBD adalah digunakan untuk belanja pegawai, sehingga mengakibatkan berkurangnya dana untuk pengembangan proyek. (Nany *et al.*, 2022). DAU memiliki tujuan untuk mengimbangi sumber daya keuangan antar daerah serta mendukung kegiatan pemerintah, termasuk program pengurangan kemiskinan. (Mardiansyah *et al.*, 2023). Dapat diketahui pada Tabel 2, tahun 2017 hingga 2019, Dana Alokasi Umum mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat. Namun pada tahun 2020-2022, Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama, dimana kondisi fiskal negara yang melemah memaksa pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian anggaran, termasuk mengurangi alokasi DAU. Selain itu, perubahan formula DAU dan evaluasi kinerja daerah juga turut berkontribusi terhadap penurunan ini. Kondisi tersebut tentu memberikan tantangan bagi pemerintah daerah Yogyakarta dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan Pembangunan. Pada tahun 2023, dana alokasi umum (DAU) di Yogyakarta kembali mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Daerah Yogyakarta menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan DAU yang ada. Artinya, DAU harus disalurkan secara efisien dan efektif ke program-program yang berkontribusi langsung terhadap pemulihan ekonomi. Dengan menggunakan dana alokasi umum (DAU) yang efisien dan tepat sasaran, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan banyak program langsung untuk melawan kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tersebut (Mukaromah, 2024). Tujuan DAK adalah membantu tanggung jawab daerah tertentu, seperti urusan daerah, untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur dan masyarakat yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum, guna mendorong kemajuan pembangunan daerah (Ginting *et al.*, 2024). Dapat diketahui pada Tabel 2 tahun 2018 Dana Alokasi Khusus pada provinsi D.I Yogyakarta mengalami menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019-2021 meskipun perubahan keuangan diterapkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun DAK mengalami peningkatan, Pemerintah D.I Yogyakarta tetap menyalurkan DAK untuk berbagai sektor, khususnya yang terlibat dalam penanganan pandemi. Namun Pada tahun 2022 DAK mengalami penurunan dan pada tahun 2023 DAK mengalami peningkatan, Hasil langsung dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat provinsi D.I Yogyakarta.

DBH didistribusikan berdasarkan persentase tertentu untuk membantu kebutuhan daerah dalam inisiatif desentralisasi (Lulu jumkhairatul *et al.*, 2023). Pendapatan yang dibagikan kepada pekerja (DBH) meliputi pendapatan sumber daya dan pajak. Dalam skema Dana Bagi Hasil yang berkaitan dengan pendapatan sumber daya alam, pendapatan tersebut perlu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah (Akita *et al.*, 2021). Permasalahan DBH erat kaitannya dengan nilai-nilai keterbukaan dan tanggung jawab. Tujuan dari pendistribusian DBH adalah untuk memperkuat pembangunan secara merata di seluruh level, termasuk tingkat nasional dan lokal, dengan mengurangi kesenjangan antara wilayah yang menghasilkan sumber daya dan wilayah yang tidak menghasilkan sumber daya (Azizah *et al.*, 2022). Pada tahun 2017-2019 Dana Bagi Hasil mengalami penurunan, salah satu faktor yang menyebabkan penurunan yaitu perubahan formula perhitungan DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Perubahan ini dapat mengubah bobot variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan, sehingga berdampak pada alokasi dana ke daerah. Pada tahun 2020-2021 DBH mengalami peningkatan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 telah mendorong pemerintah pusat untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih besar kepada daerah termasuk Yogyakarta, stimulus ini berupa peningkatan alokasi DBH atau transfer dana lainnya yang berdampak pada keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk membantu daerah dalam mengatasi dampak negatif pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Peningkatan alokasi DBH menjadi salah satu bentuk stimulus fiskal tersebut. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dan di tahun 2023 DBH mengalami peningkatan, aktivitas ekonomi bergeliat kembali. Hal ini dapat meningkatkan produksi sektor-sektor penghasil sumber daya alam, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan dari sektor-sektor ini.

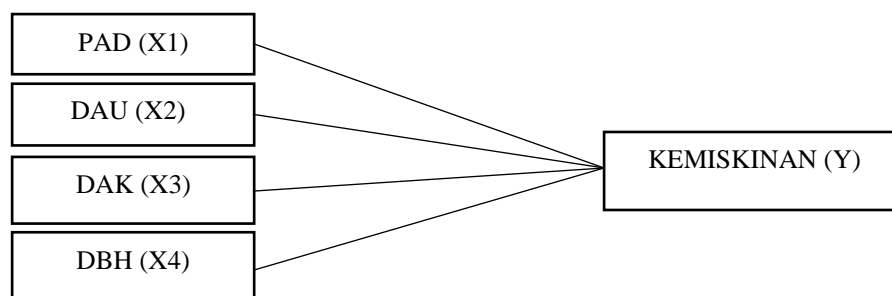
Hasil penelitian yang dilakukan Marya, dkk (2024) menunjukkan kemiskinan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap desentralisasi fiskal secara langsung. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ernita (2024) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Ariel Faza Mahendra dan Bahtiar Fitanto (2023). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK, dan PDRB secara simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Selanjutnya secara parsial DBH dan PDRB memiliki mempengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PAD, DAU, dan DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Menurut Keynes (1936), permasalahan kemiskinan disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang bersifat paradoks yang disebut "kemiskinan di kelimpahan". Hal ini berarti kemiskinan, kelimpahan, ketidakstabilan bersifat endogen, dan fungsi pasar tenaga kerja dan modal yang tidak terbatas menciptakan pasar yang kuat. Keynes menekankan bahwa ketidakmampuan sistem untuk melakukan penyesuaian secara otomatis menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi kebutuhan sehingga menimbulkan kesenjangan yang meminggirkan kelompok (Safitri *et al.*, 2022). Menurut Todaro dan Smith, beberapa karakteristik berikut menyebabkan kemiskinan: yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pendapatan nasional yang rendah di negara-negara berkembang; yang kedua adalah pendapatan per kapita yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat, bahkan sering stagnasi. Ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata menambah permasalahan kemiskinan di negara-negara ini. Keempat, mayoritas kemiskinan yang dialami di negara berkembang adalah kemiskinan absolut. Kelima, ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan masih terbatas dengan kualitas yang rendah, yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami gizi buruk dan penyakit, serta tingkat kematian bayi yang tinggi. Keenam, fasilitas pendidikan di negara berkembang memiliki kualitas yang relatif rendah dan kurikulum yang diterapkan kurang relevan (Ernita, 2024).

Teori desentralisasi fiskal generasi pertama (Musgrave, 1959; Oates, 1972) juga menjelaskan bahwa redistribusi kebijakan-kebijakan seperti tunjangan kesejahteraan harus menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat karena beberapa alasan, terutama karena daerah miskin akan bisa bersikap kurang dermawan dibandingkan dengan yang kaya (Ayala *et al.*, 2021). Teori desentralisasi fiskal generasi kedua telah dikembangkan oleh Oates (2005), yang mencatat bahwa politik meningkatkan efisiensi ekonomi dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengalihan kewenangan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan desentralisasi fiskal, kapasitas moneter pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dapat ditingkatkan. Desentralisasi keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan yang unik, seperti pajak daerah, permintaan daerah, dan hasil perdagangan milik daerah. Peningkatan pendapatan daerah yang tercipta dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pembangunan yang berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan (Faza, 2024).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana desentralisasi fiskal secara parsial dan simultan berdampak pada kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Temuan penelitian ini diyakini akan meningkatkan pemahaman mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap inisiatif D.I Yogyakarta untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan agar kebijakan fiskal dapat berhasil dan meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan ekonomi kabupaten dan kota di seluruh provinsi D.I Yogyakarta, diperlukan kajian mengenai efektivitas desentralisasi fiskal berdasarkan fakta dan temuan penelitian di atas. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui sejauh mana desentralisasi fiskal dapat menurunkan angka kemiskinan dan dapat dipastikan melalui penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2023”.



Sumber: Data Penelitian, 2024

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Bisa ditarik Hipotesis di antaranya:

H₁ = Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan D.I Yogyakarta tahun 2017-2023

H₂ = Diduga adanya pengaruh negatif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2023

H₃ = Diduga adanya pengaruh positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2023

H₄ = Diduga adanya pengaruh negatif dan signifikan Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2023

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Panel data akan dikumpulkan dari enam kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2023. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Sampling jenuh dipakai untuk mengumpulkan sampel dari seluruh populasi penelitian di provinsi D.I Yogyakarta. Sampling jenuh diartikan dengan memanfaatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2002:61–63). PAD (X1) menggambarkan pendapatan suatu daerah yang dapat diperoleh provinsi D.I Yogyakarta. PAD diukur dalam satuan Rupiah. DAU (X2) mewakili dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Dana Alokasi Umum diukur dalam Rupiah. DAK (X3) menampilkan pendapatan yang dihasilkan APBN yang dialokasikan pada kabupaten atau kota tertentu. Dana alokasi khusus diukur dalam Rupiah. Dana DBH (X4) diberikan kepada daerah dari pendapatan APBN berdasarkan persentase. Dana Bagi Hasil diukur dalam Rupiah. Kemiskinan (Y) menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Kemiskinan dapat dinilai dalam bentuk persentase. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Peneliti menggunakan Uji *Chow*, Uji *Hausman* serta Uji LM untuk mengidentifikasi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) yang paling cocok, peneliti juga melakukan Uji Asumsi Klasik (Noermanisa, 2023). Model regresi yang digunakan adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y: Kemiskinan

α : Konstanta

X1: PAD

X2: DAU

X3: DAK

X4: DBH

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

ϵ : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier berganda atau *multiple linier regression* adalah teknik yang menggunakan struktur panel data yang melibatkan beberapa variabel bebas dan variabel terikat (Alamsyah *et al.*, 2022). Sebelum memperkirakan model regresi, analisis akan melibatkan penggunaan model data panel untuk menguji hasilnya. Model regresi ini dapat dipilih melalui metode seperti Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Uji Asumsi klasik, Uji F, Uji T, serta Koefisien Determinasi.

Uji *Chow*, disebut juga uji rasio kemungkinan, adalah teknik untuk memilih model optimal dalam regresi data panel antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Common Effect Model* (CEM) (Madany *et al.*, 2022). Tabel 3 menunjukkan hasil Uji *Chow* dan nilai F *cross-sectional* yang digunakan untuk pengambilan keputusan. *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih dalam pengujian ini karena nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,050$ (α).

Tabel 3.
Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8,401	5,320	0,000
Cross-section Chi-square	35,214	5,000	0,000

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12, 2024

Tujuan dari alat analisis *Hausman* Test adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara kesalahan komposit model dari beberapa variabel penjelas (Indrasetyaningih & Wasik, 2020). Uji *Hausman* membantu dalam menentukan antara FEM dan REM. Model ini dilakukan agar mengetahui model mana yang paling terbaik dalam uji ini (Silmi, 2017). Hasil dari pengujian dengan menggunakan data *cross-section* disajikan pada Tabel 4 Model yang terbaik dalam uji ini yaitu REM karena nilai probabilitas $0,338 > 0,050$ (α).

Tabel 4.
Uji Hausman

Test Summary	Chi-square	Chi sq.df	Prob.
Cross-section random	4539931	4	0,338

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12, 2024

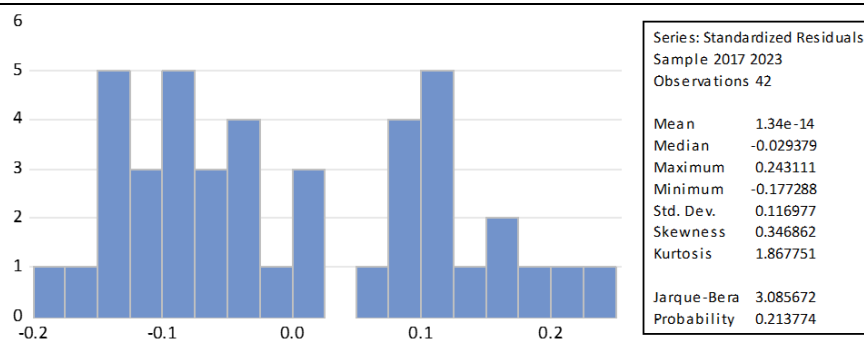
Analisis data panel menggunakan uji *Lagrange Multiplier* sebagai cara mengidentifikasi model regresi yang cocok antara CEM dan REM. Uji ini menggunakan distribusi *chi-square* berdasarkan derajat kebebasan terkait kuantitas variabel bebas. Jika nilai LM melebihi nilai *chi-square* maka REM adalah model yang cocok; jika nilai LM lebih kecil dari *chi-square*, maka CEM adalah model yang cocok. Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa REM adalah model yang paling sesuai berdasarkan hasil *Lagrange Multiplier Test*, khususnya mempertimbangkan nilai *Breusch-Pagan Cross-Section* dengan probabilitas $0,001 < 0,050$ (α).

Tabel 5.
Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	11,039	14,591	25,630
	0,001	0,000	0,0000

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12, 2024

Uji normalitas, memeriksa apakah residu standar suatu model regresi terdistribusi secara teratur. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis plot probabilitas normal. Metode standar untuk menganalisis normalitas melalui histogram probabilitas dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas. Dalam pendekatan ini, residu biasanya tersebar ketika garis (titik) yang menggambarkan data yang diamati sejajar atau berpotongan secara diagonal (Junaidi, 2019). Metode Jarque-Bera digunakan dalam penelitian ini. Probabilitas $> 0,05$ maka model distribusi regresi dianggap normal. Probabilitas yang $< 0,05$ menunjukkan adanya distribusi dalam model regresi. Berdasarkan pada Gambar 1 Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal, dengan nilai probabilitas sebesar $0,214 > 0,050$ (α).



Sumber: Data Diolah dengan EViews 12, 2024

Gambar 2. Uji Normalitas

Uji multikolinieritas adalah alat uji yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel bebas. Jika tidak terdapat hubungan antar variabel dalam uji multikolinieritas, maka model regresi dianggap efektif. Ghozali (2017:73) menyatakan bahwa tidak adanya multikolinieritas antar variabel, dibuktikan melalui suatu pengujian, karena nilai korelasi antar variabel semuanya berada di bawah 0,900. Berdasarkan pada Tabel 6, koefisien uji multikolinieritas antar variabel dalam penelitian ini berada di $< 0,900$. Hal ini menunjukkan tidak terdapat bukti multikolinieritas pada data.

Tabel 6.
Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,780	1,506	-0,518	0,608
X1	-0,022	0,027	-0,821	0,417
X2	0,091	0,099	0,919	0,364
X3	-0,026	0,039	-0,672	0,506
X4	-0,002	0,022	-0,082	0,935

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12, 2024

Uji Asumsi Heteroskedastisitas adalah uji untuk menentukan apakah suatu residu homogen atau heterogen (Rivki & Bachtiar, 2021). Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi penyimpangan dari asumsi standar. Heterogenitas mengacu pada varians yang tidak sama dari observasi yang tersisa dalam model regresi. Model regresi mensyaratkan tidak adanya indikasi heteroskedastisitas. Berdasarkan pada Tabel 7 pada penelitian ini Nilai probabilitas masing-masing variabel independen $< \alpha$ 0,05 atau 5% yang menunjukkan bahwa variabel independen bebas dari heteroskedastisitas atau merupakan variabel homogen, sesuai dengan temuan Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Tabel 7.
Uji Heteroskedastisitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1,000	0,615	0,557	0,804
X2	0,615	1,000	0,860	0,487
X3	0,557	0,860	1,000	0,390
X4	0,804	0,487	0,390	1,000

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12, 2024

Tabel 8. menggambarkan bahwa pada pengujian analisis regresi dengan *Random Effect Model*, variabel PAD (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel yang ditunjukkan

dengan nilai koefisien 0,461 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,050$ terhadap Kemiskinan (Y). Variabel DAU (X2) mempunyai nilai koefisien -1,063 dan nilai probabilitas $0,000 < 0,050$ menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y). Variabel DAK (X3) mempunyai nilai koefisien 0,039 dan nilai probabilitas $0,530 > 0,050$ menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Variabel Kemiskinan (Y). Variabel DBH (X4) mempunyai nilai koefisien -0,082 dan nilai probabilitas sebesar $0,014 < 0,050$ sehingga menunjukkan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

Berdasarkan pengujian regresi dengan *Random Effect Model* menunjukkan bahwa kepastian model yang terbaik untuk menjawab tujuan penelitian ini. Hasil regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model*, jika dimasukkan ke dalam persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 26,235 (\alpha) + 0,461 (\beta_1) - 1,063 (\beta_2) + 0,039 (\beta_3) - 0,082 (\beta_4) + \varepsilon \dots \dots \dots (3)$$

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi (*Random Effect Model*)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	prob.
C	26,235	3482051	7534251	0,000
X1	0,461	0,059	7783628	0,000
X2	-1,063	0,182	-5823941	0,000
X3	0,039	0,016	0,635	0,530
X4	-0,082	0,032	-2575252	0,014

Sumber: Data Diolah dengan *EViews* 12, 2024

Uji F yang disebut juga uji simultan dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam persamaan regresi yang secara kolektif mempengaruhi nilai variabel dependen diurutkan berdasarkan signifikansinya menggunakan uji F. Dengan F-statistik sebesar 24,691 dan nilai prob (*f statistic*) sebesar $0,000 < 0,050$, diketahui data pada Tabel 9 bahwa variabel X secara simultan mempengaruhi variabel Y secara simultan.

Tabel 9.
Uji Simultan

Weighted Statistics	
R-Squared	0,727
Adjusted R-Squared	0,699
S.E of Regression	0,067
F-Statistic	24,691
Prob (f-statistic)	0,000

Sumber: Data Diolah dengan *EViews* 12, 2024

Uji T adalah alat yang digunakan untuk menguji signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat serta memastikan kepentingan antara variabel. Berdasarkan data yang telah disajikan yaitu Data pada Tabel 10 variabel PAD (X1) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y), berdasarkan hasil uji T baik variabel DAU maupun DBH mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). sedangkan Variabel DAK (X3) mempengaruhi secara positif terhadap variabel kemiskinan (Y), namun tidak signifikan secara statistik.

Tabel 10.
Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
X1	7783628	0,000
X2	-5823941	0,000
X3	0,635	0,530
X4	-2575252	0,014

Sumber: Data Diolah dengan *EViews* 12, 2024

Koefisien determinasi (R^2) merupakan statistik yang sejauh mana perubahan variabel bebas dapat menyebabkan variasi pada variabel terikat. Pada Tabel 9 menunjukkan nilai *Adjusted R squared* yaitu 0,727 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas X menjelaskan variabel terikat Y yaitu Kemiskinan sebesar 72,74 persen, sedangkan sisanya 27,26 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tercermin dalam variabel pengganggu.

Pada Tabel 8 Pada analisis *Random Effect Model* terlihat Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) dengan Nilai Probabilitas sebesar 0,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurrisqi *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah ternyata berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan semakin tinggi pula garis kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta. Peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung dapat menyebabkan peningkatan garis kemiskinan. Selain itu, dugaan searah ini juga menyoroiti potensi dampak tidak langsung, dimana PAD dapat memberikan dampak melalui pertumbuhan ekonomi, yang kemudian mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada analisis *Random Effect Model* terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) dengan nilai Koefisien sebesar -1,063 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Dalam hal ini nilai koefisien negatif menunjukkan adanya hubungan searah, temuan tersebut mendapat dukungan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kemala *et al.*, 2024) yang juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan. pada tingkat kemiskinan. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin rendah angka kemiskinan. Menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan. dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan analisis *Random Effect Model* dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y) dengan nilai Koefisien sebesar 0,039 dan nilai probabilitas sebesar 0,530. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faza, 2024) yang menyatakan bahwa hasil analisis *Fixed Effect Model* dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan Artinya ketika Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Dana alokasi meningkat, angka kemiskinan cenderung meningkat, namun perubahan ini tidak dapat dianggap signifikan secara statistik. Dengan kata lain, perubahan Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai dampak yang kuat dan konsisten terhadap angka kemiskinan, setidaknya dalam konteks penelitian ini. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah khusus tertentu oleh pemerintah pusat untuk mendukung program pembangunan nasional pada sektor tertentu, khususnya pada sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif yang menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, untuk memeriksa dan memastikan bahwa penggunaan dana yang dialokasikan khusus tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan rutin terhadap penggunaan dana yang dihimpun.

Berdasarkan analisis *Random Effect Model* dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (X₄) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y) dengan nilai Koefisien sebesar -0,082 dan nilai Probabilitas sebesar 0,014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rasu *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya jika dana bagi hasil meningkat maka angka kemiskinan akan menurun. Artinya Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh dalam menurunkan Kemiskinan, DBH yang diterima dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk mendanai berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi DBH dan mengalokasikannya secara efektif dan tepat sasaran, misalnya untuk pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, sebagian sumber keuangan DBH berasal dari pajak daerah sehingga berkontribusi terhadap realisasi desentralisasi (Gumelar & Khairina, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana desentralisasi fiskal secara parsial dan simultan berdampak pada kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Berdasarkan pada pengujian dan analisis menggunakan *Random Effect Model*, secara simultan bahwa menunjukkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. secara parsial PAD mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan artinya, semakin tinggi PAD, semakin meningkat tingkat kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta peningkatan PAD dapat secara langsung merangsang peningkatan tingkat kemiskinan. Selanjutnya DAU mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan artinya, semakin tinggi besaran Dana Alokasi Umum, semakin menurun tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di wilayah DIY. Sedangkan DAK mempengaruhi secara positif namun tidak signifikan variabel kemiskinan, Artinya, ketika Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan, angka kemiskinan cenderung meningkat, namun perubahan ini tidak dapat dianggap sebagai signifikan secara statistik. Kemudian DBH juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan, Artinya, Dana Bagi Hasil mempengaruhi dalam menurunkan Kemiskinan. Dengan hal ini pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi DBH serta pengalokasian DBH secara efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan pembahasan yang terjadi, peneliti dapat memberikan saran yaitu diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi D.I Yogyakarta dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan moneter kepada daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada. Diharapkan pada hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah D.I Yogyakarta untuk mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang efektif. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan desentralisasi fiskal dengan pengentasan kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta, dengan fokus pada periode 2017-2023. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), memengaruhi tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta, sebuah daerah dengan karakteristik ekonomi yang unik, seperti ketergantungan pada sektor pariwisata dan industri kreatif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap kebijakan fiskal dan kemiskinan, yang memungkinkan analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi yang terganggu. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan konsep desentralisasi fiskal dalam konteks pengentasan kemiskinan di D.I. Yogyakarta serta penyajian rekomendasi kebijakan berbasis data yang relevan dengan kondisi ekonomi daerah, yang dapat menjadi referensi untuk daerah lain di Indonesia. Peneliti mengidentifikasi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu

terbatasnya data yang digunakan (hanya untuk kabupaten/kota di D.I Yogyakarta) dan fokus pada beberapa variabel tertentu. Diharapkan penelitian di masa depan dengan menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan, menggunakan metode yang berbeda, serta memperluas cakupan objek dan periode penelitian. Ini menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas.

REFERENSI

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy and Practice*, 13(6), 1842–1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2022). Analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 254–266.
- Ayala, L., Herrero, A., & Martinez-Vazquez, J. (2021). Welfare benefits in highly decentralized fiscal systems: Evidence on interregional mimicking. *Papers in Regional Science*, 100(5), 1178–1208. <https://doi.org/10.1111/pirs.12605>
- Azizah, A., Sirojuzilam, S., & Amalia Fachrudin, K. (2022). Analysis of the Effect of Regional Original Income and Fund Transfers on City Government Economic Growth in North Sumatra Province. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 901–906. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.564>
- Digdownseiso, K. (2022). Are fiscal decentralization and institutional quality poverty abating? Empirical evidence from developing countries. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2095769>
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259–274. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Ernita, D. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 937–947.
- Faza, M. A. F. B. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan PDRB terhadap Kemiskinan Jawa Timur. *Development Economic and Social Studies*, 3(1), 1–15.
- Galela, M. R. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Perlukah Desentralisasi Fiskal Diperluas? *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 59–68. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JIA/article/view/41>
- Ginting, A., Maksum, A., & . T. (2024). The Influence of Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Investment, Special Allocation Fund on Regional Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Districts/Cities in North Sumatra Province During the Peri. *International Journal of Research and Review*, 11(4), 302–317. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240434>
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Indrasetianingsih, A., & Wasik, T. K. (2020). Model Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura. *Jurnal Gaussian*, 9(3), 355–363. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v9i3.28925>
- Junaidi. (2019). Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan EViews. In *Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan EViews*.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Macmillan.
- Kemala, P., Lubis, D., Ema, H., Sinaga, N., & Nurul, S. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara ” *Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan PENDAHULUAN Ketidakmampuan ekonomi merupakan isu kom. 10(June)*, 722–735.
- Laila, H., Triwahyuningtyas, N., & Aminda, R. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 197–209. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.607>
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansium28>
- Mahmudi, H., Sriningsih, S., Cheng, L. K., Kalb, A., & Ermawati, E. (2023). How do Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation, and Special Allocation Funds impact Regional Spending in West Nusa

- Tenggara?. *Journal of Social and Humanities*, 1(2), 52-58. <https://doi.org/10.59535/jsh.v1i2.94>.
- Mardiansyah, Ahmad, A. A., & Suharno. (2023). The Influence Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, And Village Funds On Poverty In The Special Region Of Yogyakarta Province. *Proceeding of Midyear International Conference*, 2(October), 182–196.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>
- Monteiro, S. (2024). *Beyond the centre: Tracing Decentralization's influence on*. 96(June). <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103662>
- Mudawari et al. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1984–1984. <https://doi.org/10.29103/jaje.v1i2.10313>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Mukaromah. (2024). *Special Allocation Funds On Economic Growth And Human*. 2(12), 3813–3841.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 22(3), 247–261. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274%0Ahttps://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/download/8274/4938>
- Noermanisa, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di D.I. Yogyakarta. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 689–700. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.19>
- Nurriqzi, F. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. (2023). *Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019*. 3(2), 148–163.
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rimate, V. A. (2019). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Di Kota Bitung. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado ABSTRAK*, 1–10.
- Permai, S. D., Christina, A., & Santoso Gunawan, A. A. (2021). Fiscal decentralization analysis that affect economic performance using geographically weighted regression (GWR). *Procedia Computer Science*, 179(2020), 399–406. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.022>
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651-680. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p01>
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- Rivki, M., & Bachtiar, A. M. (2021). *Analisis Data dengan Eviews 9* (Issue 112).
- Silmi, S. (2017). *Metoda Penelitian*. In *Bab III Metoda Penelitian: Vol. Bab iii me*.
- Sohail, S., Ullah, S., & Javid, A. Y. (2022). Fiscal decentralization, institutional quality, and government size: an asymmetry analysis for Asian economies. *Transnational Corporations Review*, 14(3), 256–270. <https://doi.org/10.1080/19186444.2021.1956855>
- Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. *Al-Infah: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>
- Wardhana, A., & Kharisma, B. (2020). Angka harapan hidup di era desentralisasi (Kabupaten/Kota Jawa Barat). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(5), 405-422. <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i05.p02>
- Zhang, J., Ding, T., & Ma, L. (2024). Identification and prediction of the degree of multidimensional returning to poverty risk for the household in China through the novel hybrid model: Based on the survey data of China Family Panel Studies (CFPS). *Heliyon*, 10(21). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38783>